

BAB II

PEMBANGUNAN BERBASIS GENDER DI JAWA TENGAH

2.1 Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dan terletak di Pulau Jawa. Wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sekitar 3.254.412 Ha atau setara dengan seperempat dari luas Pulau Jawa. Letak Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Hindia di sebelah selatan, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, serta berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara. Kondisi fisiografis Jawa Tengah terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi, yaitu Perbukitan Rembang, Zona Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 Kecamatan yang meliputi 7.809 Desa dan 769 Kelurahan.

Berdasarkan pada kondisi fisiografis dan geografis, maka kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang draft akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2023. Wilayah Jawa Tengah memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah, sekaligus potensi wilayah yang harus dipertahankan untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya alamnya. Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berdaya saing

berbasis pertanian, industri, dan pariwisata, dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Pembangunan wilayah sendiri, selain daripada meningkatkan daya saing wilayah tetapi juga untuk mengupayakan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensinya yang dimiliki.

Pembangunan wilayah bertujuan untuk meningkatkan daya saing wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan antar wilayah, serta memajukan kehidupan masyarakat³⁴. Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan pembangunan tersebut dengan berdasarkan pada ketentuan dari peraturan perundang – undangan. RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra – PD dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran³⁵. RPJMD Tahun 2018-2023 yang disusun selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Provinsi Jawa Tengah berada pada periode pembangunan tahun 2018 – 2023, yang mana dimulai sejak dilantiknya Gubernur Jawa Tengah Ganjar

³⁴ Bappenas, *Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Tengah*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2015, Hlm 1

³⁵ Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023. Diunduh pada 1 September 2022. <https://ppid.jatengprov.go.id/rpjmd-pemerintah-provinsi-jawa-tengah/>

Pranowo serta Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen pada tahun 2018. Dalam rangka terjaminnya perencanaan pembangunan yang konsisten yang berkelanjutan dan menjadi dasar penyusunan dokumen penganggaran, maka penyusunan perencanaan pembangunan perlu memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah tersebut. Adapun dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan wilayah serta pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang akan dijadikan sebagai pedoman pembangunan selama lima tahun. Strategi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah ditempuh melalui misi – misi pembangunan yang meliputi:³⁶

- a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- d. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 tidak terlepas dari tahapan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025. Termasuk terkait dengan isu gender yang termuat dalam misi ke enam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 yaitu “Mewujudkan kehidupan

³⁶ Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, BAB VI, Hlm 15 – 20, Diunduh pada 1 September 2022, <https://ppid.jatengprov.go.id/rpimd-pemerintah-provinsi-jawa-tengah/>

masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender”, yang mana misi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 memiliki keterkaitan yaitu “Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan”, dimana didalamnya memiliki sasaran yaitu meningkatkan akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender.

Lebih lanjut pembangunan sumber daya manusia berperspektif gender dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan, selain itu juga adalah dalam peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui peran partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, dalam pelaksanaannya permasalahan yang masih perlu menjadi perhatian Pemerintah Jawa Tengah antara lain:³⁷

- a. Belum optimalnya kesetaraan gender di berbagai bidang.
- b. Belum optimalnya pemenuhan hak anak
- c. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta belum kuatnya sinergi layanan untuk penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing menjadi tujuan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan

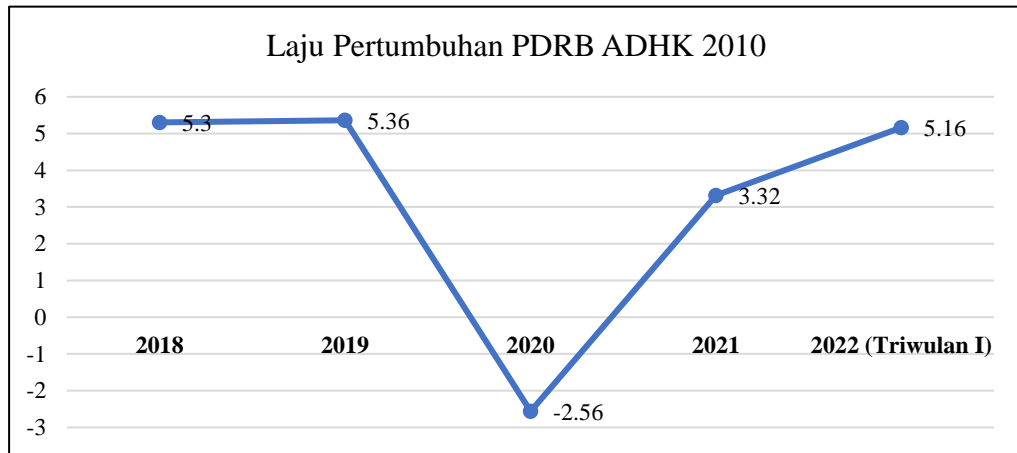
³⁷ Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, BAB IV, Hlm 8, Diunduh pada 1 September 2022, <https://ppid.jatengprov.go.id/rpjmd-pemerintah-provinsi-jawa-tengah/>

melaksanakan strategi pembangunan yang mengarusutamakan gender dan anak untuk dapat memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan anak di seluruh bidang pembangunan. Salah satu programnya adalah pelatihan mengenai gender yang merupakan bentuk implementasi program sekolah tanpa sekat yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai gender.

2.2 Kondisi Ekonomi di Jawa Tengah

Kinerja perekonomian Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2018 – 2022 berfluktuatif namun kembali meningkat pada triwulan pertama tahun 2022. Ekonomi Jawa Tengah pada triwulan pertama tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,16 persen dibanding triwulan pertama tahun 2021 (y-on-y). Sedangkan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada triwulan pertama tahun 2022 dibandingkan dengan triwulan keempat tahun 2021 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 1,75 persen. Kinerja pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dari besarnya PDRB per kapita di Jawa Tengah selama kurun waktu 2018 – 2022 cenderung meningkat, yang menunjukkan meningkatnya tingkat kesejahteraan di Provinsi Jawa Tengah, meskipun pada tahun 2020 ekonomi Provinsi Jawa Tengah sempat mengalami penurunan sebesar 2,65 persen, hal ini dikarenakan awal kemunculan pandemi COVID – 19 yang memberikan dampak dan memukul perekonomian baik nasional maupun global.

Gambar 2.1 Grafik Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010
Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2020)

Meskipun sempat menurun, ekonomi Provinsi Jawa Tengah mulai membaik pada tahun 2021 meskipun belum sekuat seperti masa sebelum pandemi. Peningkatan ekonomi Provinsi Jawa Tengah ini menunjukkan kinerja Pemerintah rata – rata berkembang dengan pesat. Berdasarkan Laporan Bank Indonesia (2022) apabila dilihat dari sisi pengeluaran, keseluruhan komponen utama PDRB Jawa Tengah mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya kecuali investasi dan konsumsi pemerintah. Meskipun melambat, namun sumber utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan I 2022 adalah ekspor luar negeri, diikuti konsumsi rumah tangga dengan andil terhadap PDRB masing-masing sebesar 2,80 persen dan 2,53 persen.

Sebagaimana menurut Bappenas tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah adalah bagaimana meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan landasan ekonomi daerah yang memperluas kesempatan kerja

dan mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Termasuk tingkat pengangguran terbuka, Provinsi Jawa Tengah terus berupaya dalam mengatasi penangguran di seluruh daerah Provinsi Jawa Tengah ³⁸. Menurut data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (2022), angka pengangguran di Provinsi Jawa Tengah hingga bulan Februari tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 6,26 persen dari tahun sebelumnya pada bulan yang sama yaitu 5,96 persen.

Tabel 2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022

No	Tahun	TPT (persen) ^{*)}
1.	2018	4,23
2.	2019	4,22
3.	2020	4,25
4.	2021	5,96
5.	2021	6,26

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2020

Ket : *) data per Februari tahun bersangkutan

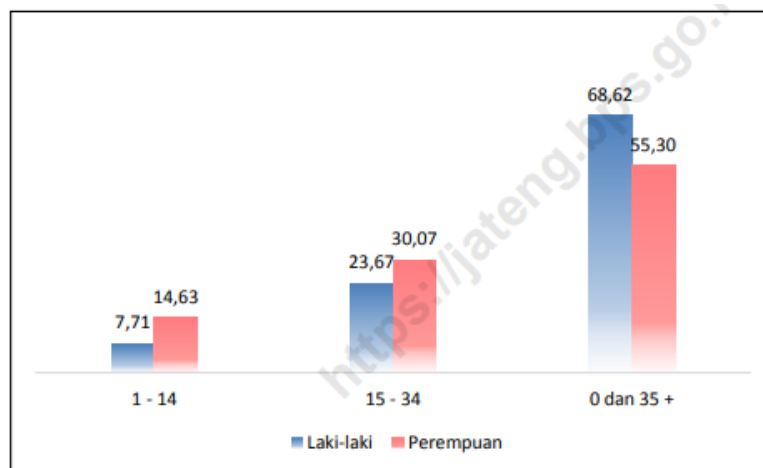
Adapun di sisi yang lain yaitu pada indikator penanganan kemiskinan laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat turut memberikan dampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah berfluktuatif, namun berdasarkan data terbaru yang di rilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

³⁸ Ibid, Hlm 2

(2022), persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 mengalami penurunan, tepatnya pada bulan Maret penduduk miskin mengalami penurunan 0,32 persen poin dibandingkan pada bulan September 2021, yaitu sebanyak 10,93 persen dari total penduduk atau 3,83 juta orang.

Aspek ketenagakerjaan partisipasi penduduk laki – laki dalam kategori angkatan kerja lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan sebagaimana data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (2020) persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari laki – laki sebesar 81,68 persen sedangkan perempuan sebesar 57,54 persen. Karyawan laki – laki yang bekerja selama 35 jam atau lebih dalam seminggu lebih banyak dibandingkan karyawan perempuan.

Gambar 2.2 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2020)

2.3 Pendidikan di Jawa Tengah

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan untuk melihat kesetaraan gender di Provinsi Jawa Tengah. Adapun apabila melihat kepada persentase rata – rata lama sekolah (RLS) di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2018 – 2021 perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki – laki.

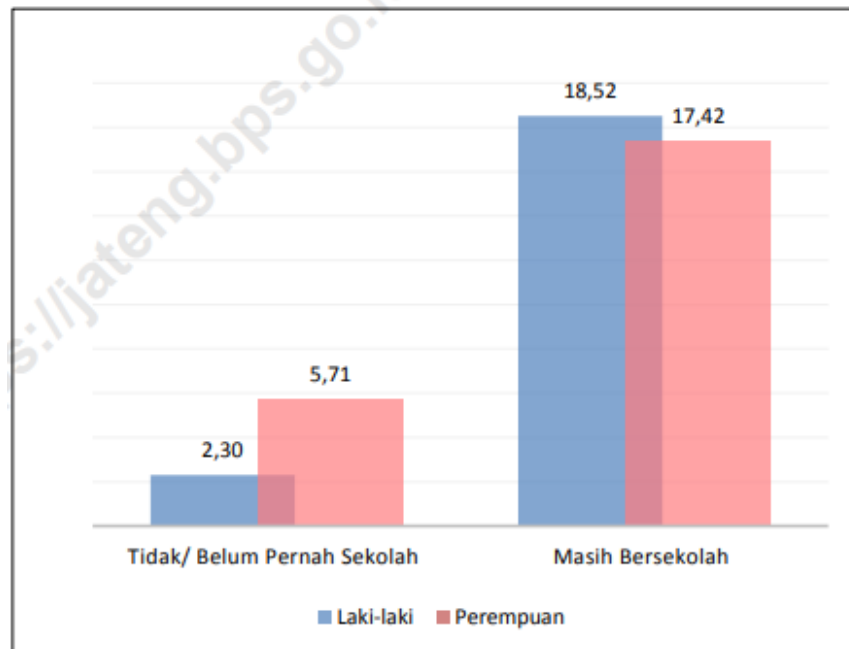
Tabel 2.2 Rata – Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Jawa Tengah
menurut Jenis Kelamin

Tahun	Laki - laki	Perempuan
2018	7,86	6,87
2019	8,06	7,03
2020	8,16	7,24
2021	8,17	7,34

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2021

Tabel tersebut menunjukkan bahwa rata – rata perempuan di atas 25 tahun bersekolah hanya sampai tingkat SD kelas VI. Lebih lanjut persentase penduduk perempuan yang tidak/belum pernah sekolah lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki, dimana hal ini berbeda dibandingkan dengan penduduk perempuan masih sekolah yang mempunyai persentase lebih sedikit dibandingkan dengan laki – laki. Selain itu juga, perempuan di Provinsi Jawa Tengah lebih banyak yang tidak memiliki ijazah, sementara laki – laki yang menamatkan pendidikan dasar sedikit lebih tinggi persentasenya.

Gambar 2.3 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Tidak/Belum Pernah Sekolah di Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Susenas, 2020

Kemudian pada Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah³⁹. Sedangkan APM yang merupakan merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut⁴⁰. Melihat kepada dua hal tersebut baik laki – laki maupun perempuan hampir sama di setiap kelompok umur dan jenjang pendidikan.

³⁹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2020*, CV Surya Lestari, Semarang, 2020, Hlm 61

⁴⁰ Ibid, Hlm 50

Tabel 2.3 APS dan APM Provinsi Jawa Tengah menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	APS			APM		
	Usia 7 – 12	Usia 13 – 15	Usia 16 – 18	SD	SMP	SMA
Laki – laki	99,54	97,39	68,60	98,55	82,54	61,19
Perempuan	99,65	98,74	71,27	98,84	83,18	62,64

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2021

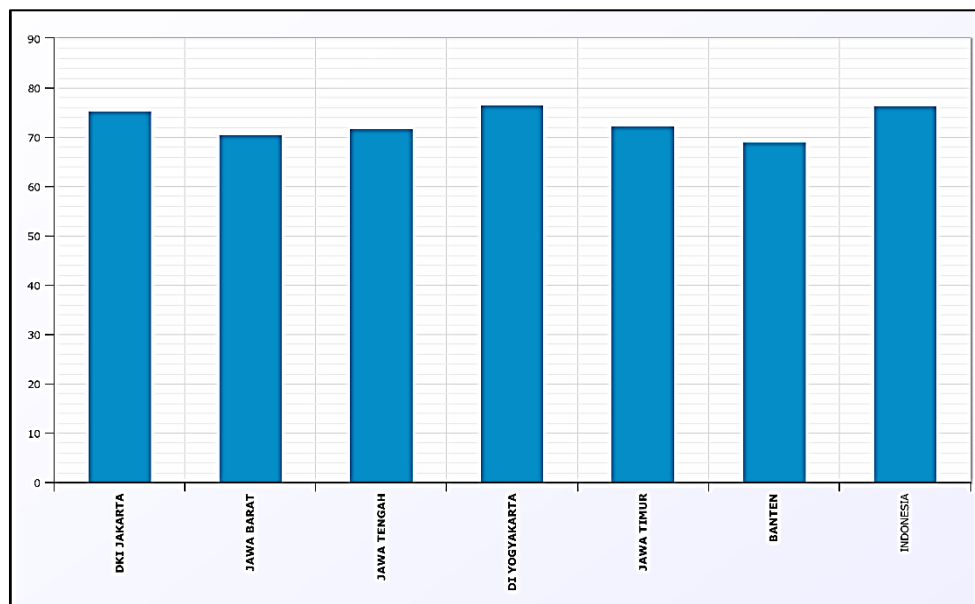
Lebih lanjut penduduk laki – laki berusia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis lebih banyak dibandingkan daripada perempuan, dimana menurut data Badan Pusat Statistik (2021) persentase laki – laki sebesar 96,23 persen dan perempuan 91,11 persen.

2.4 Pengarusutamaan Gender di Jawa Tengah

Kesetaraan gender merupakan salah satu fokus pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023. Adapun salah satu strategi untuk mencapai kesetaraan gender dalam pembangunan gender tersebut diwujudkan melalui ditetapkannya program pengarusutamaan gender (PUG). Melalui penguatan dan peningkatan pembangunan gender akan menciptakan keseimbangan pemberdayaan baik laki – laki maupun perempuan. Pemerataan pembangunan sendiri menjadi salah satu agenda penting baik dalam program nawacita maupun tujuan pembangunan berkelanjutan.

Apabila melihat pada angka IPG, Provinsi Jawa Tengah telah berada pada posisi yang cukup tinggi. Seperti yang telah diketahui apabila IPG suatu wilayah semakin rendah, maka semakin besar ketimpangan yang terjadi pada pembangunan manusia antara laki – laki dengan perempuan. Dalam konteks ini Provinsi Jawa Tengah menempati posisi ketiga angka IPG tertinggi di Pulau Jawa setelah D.I Yogyakarta dan DKI Jakarta. Bahkan, angka IPG Provinsi Jawa Tengah bahkan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan IPG Nasional.

Gambar 2.4 IPG Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2021

Namun, capaian pembangunan perempuan di Provinsi Jawa Tengah masih belum mampu menyamai laki-laki, meskipun perkembangan pembangunan manusia perempuan tumbuh lebih cepat dibanding laki – laki. Dalam kurun waktu 2011 hingga 2021, rata-rata pertumbuhan IPM laki-laki sekitar 0,69 persen, sementara perempuan 0,87 persen. Apabila ditinjau berdasarkan

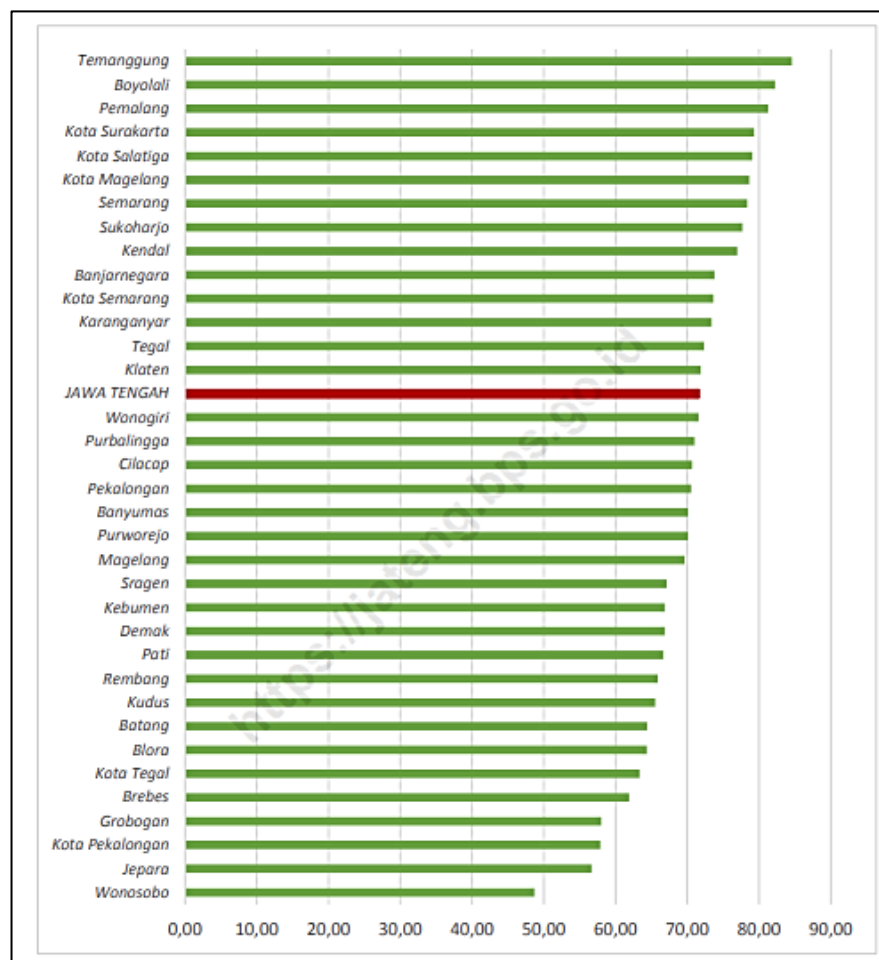
gender, terlihat bahwa IPM laki-laki di Jawa Tengah pada tahun 2021 hampir seluruh kabupaten/kota (30 kabupaten/kota) berada di kategori tinggi, dimana 4 (empat) kabupaten/kota berada di kategori sangat tinggi dan hanya ada 1 kabupaten/kota dengan capaian IPM berada di kategori sedang. Namun, hal ini berkebalikan dengan capaian IPM perempuan, dimana capaiannya sebanyak 18 kabupaten/kota masih berada pada kategori sedang dan 14 kabupaten/kota berada di kategori tinggi serta 3 (tiga) kota berada pada kategori sangat tinggi.

Perbedaan capaian pembangunan manusia antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah masih menjadi hambatan atau permasalahan yang harus diselesaikan agar capaian pembangunan di Jawa Tengah menjadi lebih berimbang. Hal tersebut berdasarkan apa yang tercantum pada Nawacita Republik Indonesia yang ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dalam konteks ini pada tahun 2021, IPG tertinggi dicapai oleh Kota Surakarta, diikuti oleh Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Klaten pada urutan ke dua hingga ke lima. Sejak tahun 2011 nilai IPG Kota Surakarta telah menduduki peringkat pertama dan masih bertahan pada tahun 2021.

Provinsi Jawa Tengah sendiri menurut data dari Bappeda (2021) tingkat Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2021 berada pada level 71,64, dimana sebanyak 60 persen atau 21 kabupaten/kota berada di bawah angka provinsi dan hanya terdapat 14 kabupaten/kota dengan capaian IDG di atas provinsi. IDG tertinggi dicapai oleh Kabupaten Temanggung sebesar 84,21,

sedangkan IDG terendah dicapai oleh Kabupaten Wonosobo sebesar 48,70. Capaian IDG kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah relatif bervariasi, dimana sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia memiliki nilai IDG sebesar 70 – 80. Adapun dari keseluruhan kabupaten/kota hanya terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan IDG di atas 80 yaitu Temanggung, Boyolali dan Pemalang, di sisi lain masih terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan IDG di bawah 60 yaitu Kota Pekalongan, Grobogan, Jepara dan Wonosobo.

Gambar 2.5 IDG Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2021

Menurut Kemenpppa data – data yang terkait dengan IPG dan IDG per kabupaten/kota dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu Kuadran I yaitu kabupaten/kota yang memiliki angka IPG dan IDG di atas nilai Provinsi; Kuadran II yaitu kabupaten/kota yang memiliki angka IPG di bawah nilai provinsi dan angka IDG di atas nilai Provinsi; Kuadran III yaitu kabupaten/kota yang memiliki angka IPG dan IDG di bawah nilai Provinsi; serta Kuadran IV yaitu kabupaten/kota yang memiliki angka IPG di atas nilai provinsi dan IDG di bawah nilai Provinsi ⁴¹. Data – data tersebut digunakan untuk mengetahui perbandingan capaian pembangunan dan pemberdayaan gender di tingkat kabupaten/kota dengan provinsi dan mengelompokkan kabupaten/kota menurut capaiannya. Capaian IPG dan IDG suatu provinsi akan menentukan posisi kuadran, sedangkan perbedaan kecepatan IPG dan IDG suatu kabupaten/kota dibanding kabupaten/kota lain dan provinsi akan menentukan pergeseran kuadran antar waktu ⁴².

Apabila melihat pada Provinsi Jawa Tengah sendiri pada posisi kuadran I dimana kelompok wilayah yang memiliki nilai IPG dan IDG diatas nilai provinsi yaitu Kota Surakarta, Karanganyar, Semarang, Sukoharjo, Klaten, Temanggung, Kota Semarang, Kota magelang, Kota Salatiga, Banjarnegara, Boyolali dan Kendal. Kemudian pada kuadran II terdiri atas daerah – daerah yang memiliki nilai capaian IPG belum mencapai nilai provinsi tetapi capaian IDG sudah diatas provinsi, yaitu Tegal dan Pemasang. Adapun sebagian besar

⁴¹Kemenpppa, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2020, Hlm IX – X

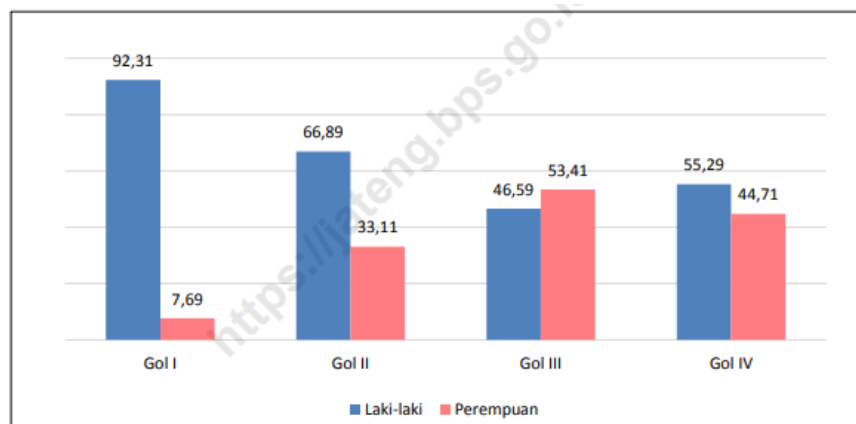
⁴² Ibid

kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki nilai IPG dan IDG di bawah angka provinsi yang akan masuk pada kategori kuadran III yaitu Pati, Magelang, Batang, Sragen, Jepara, Demak, Wonogiri, Banyumas, Rembang, Cilacap, Brebes, Grobogan dan Blora. Sedangkan pada kuadran IV yang terdiri atas kelompok daerah dengan angka IPG sudah mencapai nilai provinsi tetapi nilai IDG belum mencapai nilai provinsi yaitu Kota Pekalongan, Purworejo, Kota Tegal, Purbalingga, Kebumen, Kudus, Wonosobo dan Pekalongan.

2.5 Kepemimpinan, Politik, dan Pemerintahan

Meskipun peran perempuan dalam dunia profesional semakin meningkat pada tahun 2020 namun sebaliknya, sumbangan pendapatan perempuan maupun keterlibatan perempuan di parlemen menunjukkan penurunan. Persentase anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 81,20 persen adalah laki – laki. Bahkan persentase PNS laki – laki relatif banyak dibandingkan perempuan hampir di semua golongan. Namun, PNS untuk golongan III lebih tinggi dibandingkan PNS laki – laki.

Gambar 2.6 Persentase PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2020

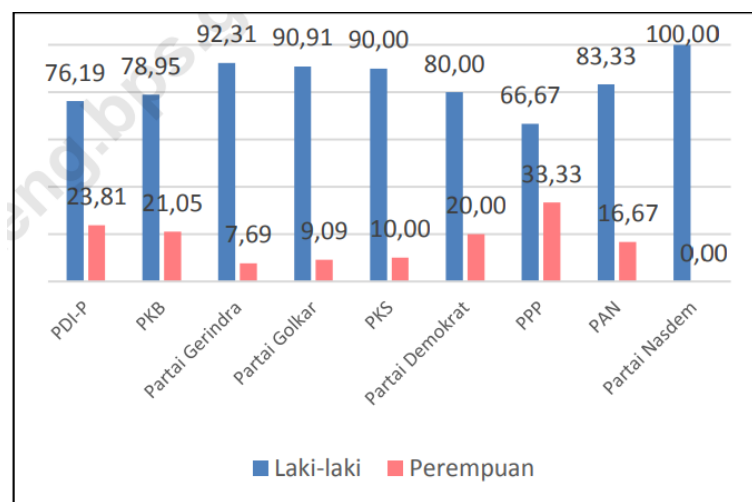
Keterwakilan 30 persen perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah masih belum terpenuhi. Komposisi jumlah anggota DPRD perempuan meskipun mengalami peningkatan jumlah, namun eksistensi perempuan dalam parlemen belum memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Adapun apabila dilihat keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2004 – 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Keterwakilan Perempuan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah

Periode	Jumlah Anggota DPRD	Jumlah Anggota Laki – laki	Persentase	Jumlah Anggota Perempuan	Persentase
2004-2009	100	85	85%	15	15%
2009-2014	100	80	80%	20	20%
2014-2019	100	77	77%	23	23%
2019-2024	120	98	81,7%	22	18,3%

Sumber: Jawa Tengah dalam Angka, 2021

Gambar 2.7 Persentase Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah menurut Asal Partai

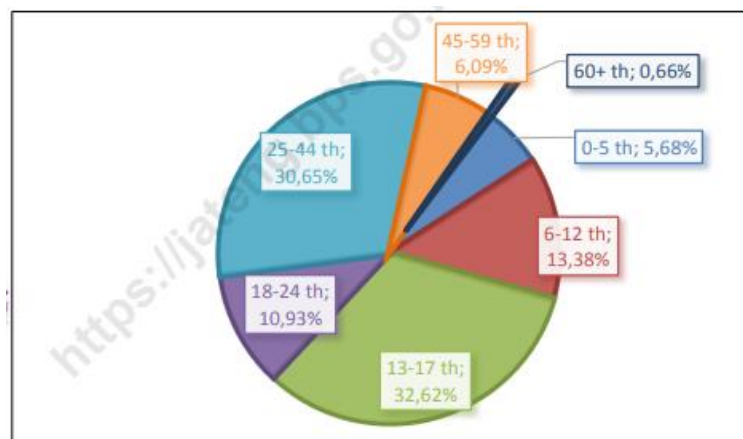


Sumber: Jawa Tengah dalam Angka, 2021

2.6 Kekerasan di Jawa Tengah

Berdasarkan data dari DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah (2020), sebanyak 79,34 persen korban kekerasan di Provinsi Jawa Tengah berjenis kelamin perempuan, serta sebanyak 91,04 persen pelaku kekerasan adalah laki – laki.

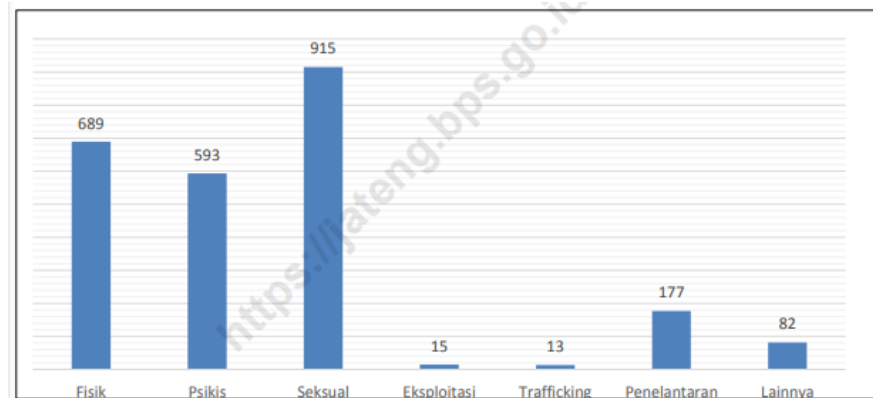
Gambar 2.8 Persentase Perempuan yang Menjadi Korban Kekerasan Menurut Kelompok Usia



Sumber: DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, 2020

Apabila dilihat berdasarkan kelompok umur, perempuan di Jawa Tengah pada kelompok umur 13 – 17 tahun paling banyak menjadi korban kekerasan, yakni 32,62% pada tahun 2020. Kemudian, diikuti oleh perempuan kelompok umur 25 – 44 tahun yang menjadi korban kekerasan sebanyak 30,65%. Kemudian sebanyak 13,38% perempuan umur 6 – 12 tahun menjadi korban kekerasan pada tahun lalu. Disusul oleh perempuan umur 18 – 24 tahun sebanyak 10,93%, 45 – 49 tahun, 6,09%, 0 – 5 tahun 5,68%, dan lebih dari 60 tahun 0,66%.

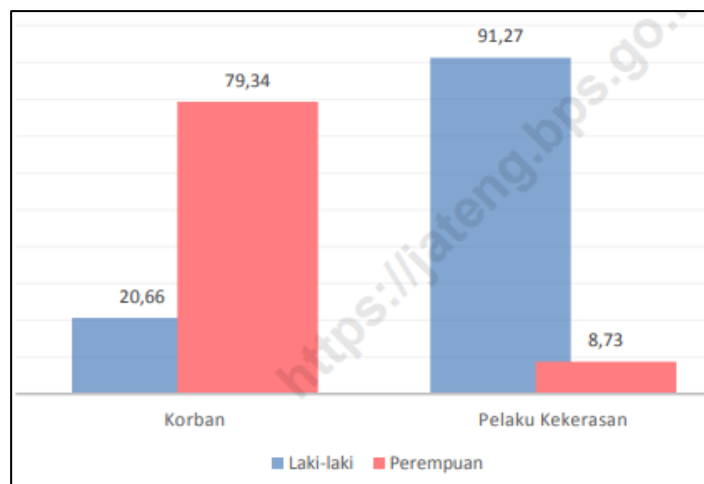
Gambar 2.9 Jumlah Perempuan yang Menjadi Korban Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Kekerasan yang menjadi jenis kekerasan terbesar yang dialami oleh perempuan baik anak maupun dewasa meliputi, kekerasan fisik, kekerasan psikis, serta kekerasan seksual. Kekerasan lebih banyak dialami oleh perempuan dan sebagian besar dilakukan atau pelakunya adalah laki – laki.

Gambar 2.10 Persentase Korban dan Pelaku Kekerasan Menurut Jenis Kelamin



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020